

LAPORAN MONITORING



Tribunal

KHMER MERAH

Penyusun Laporan

AVIVA NABABAN

credit cover <http://www.cambodia.gov.kh/ort/english/premisesec.htm>

**MONITOR TRIBUNAL KHMER MERAH (TKM) – ISSUE NO. 2
(30 MARET-1 APRIL 2009)- EDISI 2 (MARET 30 – APRIL 1, 2009)**

Dalam Monitor TKM edisi minggu ini ...

Pernyataan pembukaan Jaksa (Co-Penuntut Umum) menyatakan bahwa Duch adalah seseorang yang “mengendalikan dengan seksama ticularly” S-21 (hal.2-3); Duch memohon kepada masyarakat Kamboja untuk “membuka jendela untuk memberikan maaf) (hal. 3); penahanan bersyarat (provisional detention) Duch ditentang oleh pihak Pembela (hal. 4); Pihak Sipil (Civil Parties) memohon agar diberikan lebih banyak hak untuk angkat bicara di muka persidangan (hal. 6); Beberapa aspek penerjemahan mengkhawatirkan (hal.7)

1. Ringkasan

“Lawan kata dari melupakan bukanlah mengingat, melainkan keadilan.”ⁱ

Setelah persidangan yang pada umumnya bersifat simbolis pada pertengahan bulan Februari, Majelis Persidangan Tribunal Khmer Merah untuk keduanya membuat jejak sejarah minggu ini dengan menyatakan pembukaan persidangan substantif untuk kasus Kaing Guek Eav alias ‘Duch’. Berbicara “atas nama rakyat Kamboja dan PBB” dihadapan galeri yang dipenuhi pengunjung dan disorot oleh banyak media, Ketua Majelis Hakim Nil Nonn secara resmi menyatakan bahwa terdakwa didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran berat Konvensi Jenewa dan pelanggaran KUHP Kamboja.

Tahap awal persidangan terhadap Duch’s yang dinanti-nantikan oleh banyak pihak berjalan lambat, dengan hari pertama hanya diisi dengan pembacaan resmi BAP-Surat Dakwaan (*Closing Order*). Terdakwa dengan hati-hati membaca dokumen BAP-surat dakwaannya sementara Panitera Kamboja membacakan analisa faktual, dan para petugas keamanan menegur para pengunjung di galeri publik yang tertidur. Namun ada saat-saat dimana beberapa Pihak Sipil terlihat terganggu dan menangis. Percepatan persidangan meningkat pada hari Selasa, Co-Penuntut Umum menyampaikan pernyataan pembukaan yang terdengar meyakinkan, dan Duch serta kedua Co-Pembelanya memberikan tanggapan dengan meyakinkan pula. Legalitas penahanan bersyarat terdakwa menjadi isu kunci yang dibahas pada hari Rabu pagi. Secara tidak terduga, isu partisipasi korban memancing diskusi yang panjang setelah Pembela dan Penuntut Umum mengajukan permohonannya.ⁱⁱ Akhirnya, persidangan ditutup dengan Robert Petit membacakan fakta-fakta yang diadopsi oleh Hakim Penyidik (*judicially noted facts*) yang sudah disepakati oleh Pembela sebelumnya sebagai fakta yang disetujui atau tidak dipertentangkan oleh para pihak.

Secara keseluruhan minggu pertama berjalan dengan cukup efisien, walaupun terjadi permasalahan yang patut dicatat berkenaan dengan penerjemahan. Kehadiran public di persidangan juga berkurang selama satu minggu ini: pada hari pertama galeri public sangat padat, namun pada hari-hari berikut jumlah public semakin turun. Banyak pihak Sipil hadir yang hadir pada hari Senin dan Selasa tidak hadir lagi di hari-hari berikutnya yang kemungkinan disebabkan karena Unit Korban Pengadilan tidak menyediakan dukungan dana untuk membiayai kehadiran mereka.

Persidangan minggu pertama mengungkapkan apa yang nampaknya akan menjadi isu utama dari kasus ini secara keseluruhan, yakni tingkatan pertanggungjawaban individu yang harus dikenakan kepada Terdakwa atas peranannya dalam suatu jejaring tindak pidana yang rumit. Duch mengakui berbagai tuduhan yang dinyatakan terhadapnya, namun ia menentang tingkatan pertanggungjawabannya. Satu hal lagi yang harus dipertimbangkan oleh pengadilan adalah seberapa jauh ungkapan penyesalannya akan dilihat sebagai sesuatu yang relevan. Isu penting lainnya yang terangkat dalam persidangan minggu ini adalah seberapa jauh pihak sipil dapat menerapkan haknya untuk berpartisipasi dalam persidangan substantive kasus ini.

2. Isu Hukum dan Acara

Pembacaan BAP-Surat Dakwaan: Sesuai dengan Peraturan 89(1)*bis* Peraturan Internal ECCC, analisa fakta dan dakwaan yang tercantum dalam BAP-Surat Dakwaan dibacakan oleh Panitera pada hari pertama persidangan.ⁱⁱⁱ BAP-Surat Dakwaan yang dibacakan dalam Bahasa Khmer terdiri dari fakta-fakta berkenaan dengan konteks sejarah dan politik S-21, karakter hukum tindakan-tindakan Duch dan informasi tentang karakter Duch.

Selain beberapa permasalahan dengan penerjemahan, pembacaan BAP_surat dakwaan berjalan tanpa interupsi. Namun ketika pembacaan usai, Pengacara Pembela François Roux mengungkapkan ketidakpuasannya karena menurutnya Panitera hanya membacakan bagian BAP-Surat Dakwaan yang “memberatkan”, merincikan tuduhan-tuduhan terhadap kliennya. Roux berargumentasi bahwa Terdakwa harusnya diberikan hak agar aspek-aspek yang “meringankan” juga dibacakan di muka Pengadilan- yakni paragraph-paragraf berkenaan tentang karakter, reputasi, dan pengakuannya yang konsisten berkenaan tentang pertanggungjawabannya terhadap kejahatan-kejahatan yang terjadi karena perintahnya. Majelis menolak permintaan ini dengan alasan fakta-fakta berkenaan dengan karakter dan keadaan psikologis Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai “analisa fakta” maupun “dakwaan” sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Rule 89*bis*. Lebih jauh lagi Majelis mencatat bahwa Pengadilan telah mengalokasikan waktu kepada para pihak untuk memaparkan bukti berkenaan tentang karakter Terdakwa selama persidangan.^{iv}

Pernyataan Pembukaan (Opening Statement) Co Jaksa. Pernyataan pembukaan Co-Jaksa dan tanggapan dan tanggapan dari Co-Pembela dan Duch sendiri mendominasi persidangan hari Selasa. Co-Jaksa Nasional Chea Leang memaparkan konteks sejarah dan politik dari didirikannya S-21. Secara khusus ia merincikan tentang hirarki politik CPK (Partai Komunis Kamboja) yang beroperasi dalam suatu keadaan yang ia gambarkan sebagai konflik bersenjata dengan Vietnam yang semakin parah seiring dengan berjalannya waktu. Co-Jaksa dalam merincikan tentang struktur hirarki dan peranan yang dituduhkan terhadap Duch di penjara S-21 dan S-24 (**'Prey Sar'**) serta Choeung Ek menayangkan peta, diagram dan potongan-potongan film dalam usahanya untuk merincikan keterlibatan yang didakwakan terhadap Terdakwa sebagai suatu usaha sistematis untuk mengentaskan musuh-musuh partai. Chea Leang juga memfokuskan diri pada memaparkan analisa factual tentang populasi tahanan di S-21, dan kondisi tidak manusiawi dan merendahkan yang dikenakan terhadap mereka.^v Ini mencakup tahanan dipasung, tidak diberikan air, makanan maupun perawatan kesehatan dan dipukul serta disetrum untuk mendapatkan pengakuan dari mereka. Ia juga menunjukkan suatu diagram yang merincikan demografi dari populasi tahanan.^{vi}

Co-Jaksa International, Robert Petit, dengan cara yang serupa dengan mitra Nasionalnya, kemudian melanjutkan pernyataan pembukaan jaksa dengan merincikan suatu daftar teknik penyiksaan yang digunakan serta menggambarkan kondisi perbudakaan yang dituduhkan sebagai telah dilakukan terhadap para tahanan di S-21. Sebagai pengakuan simbolis atas struktur hibrida pengadilan ini, ia membacakan pernyataannya dalam bahasa Inggris dan Prancis. Ia berusaha agar ketiga bahasa yang digunakan dalam kerja Pengadilan direpresentasikan dalam pernyataan pembukaan Co-Jaksa (Chea Leang menggunakan bahasa Khmer). Dalam pernyataannya Robert Petit juga membahas tentang tuduhan-tuduhan berkenaan dengan peranan Duch dalam memerintahkan penyiksaan dan eksekusi para tahanan, yakni bukan saja sebagai atasan namun juga sebagai pelaku langsung. Intinya Petit menyatakan bahwa pertanggungjawaban Duch didasarkan pada fakta bahwa ia "secara sadar dan aktif" menerapkan "kewenangan yang independent" terhadap kinerja pusat keamanan itu. Kembali dengan menggunakan bantuan visual yang mencakup diagram tentang struktur hirararki di S-21, ia menyatakan bahwa Duch merancang kondisi tidak manusiawi yang terdapat dalam pusat interogasi tersebut, memerintahkan dilakukannya penyiksaan dan berpartisipasi dalam eksekusi para tahanan. Ia lebih jauh lagi menyatakan bahwa Duch memiliki kepentingan sendiri dalam memastikan bahwa S-21 menjalankan kinerjanya sebagaimana yang dimaksudkan, karena ia secara langsung bertanggungjawab pada para anggota Komisi Kerja (*Standing Committee*) CPK- khususnya Nuon Chea dan Son Sen. Robert Petit juga mengungkapkan bahwasanya keadaan dimana Duch dapat berkomunikasi langsung dengan eselon tinggi Kamboja Demokratis (DK) membuktikan bahwa Duch mendapatkan tingkat kepercayaan yang cukup tinggi. Co-Jaksa Internasional kemudian menyatakan kesangsiannya terhadap penyesalan Duch, dan ia menggambarkan Terdakwa sebagai "pengendali yang berhati-hati" di pusat interogasi Phnom Penh tersebut. Ia kemudian memohon kepada Majelis untuk

memungkinkan pertanggungjawaban sepenuhnya dari peranan Terdakwa dalam kejahatan-kejahatan yang didakwakan dengan menerapkan teori JCE (*joint criminal enterprise*)¹ terhadap fakta-fakta yang ada.

Finally, in an apparent bid to pre-empt the response of the Defense lawyers, Petit dismissed any suggestion that Duch performed a limited and perfunctory role at S-21 as illogical and “unsupported by [the] evidence.” Pointing to the role the accused played at the M-13 interrogation center, which he saw as a “training ground for the accused”, he further asserted, “the past can help us shed light on the present”. Duch’s 28-year involvement with the CPK was alleged to cast doubt on his current pleas for remorse.

Sudut Pandang Pembela: Tanggungjawab Duch terhadap Kejahatan dan Pelanggaran Serius yang terjadi di S-21. Atas permintaan Pengacara Pembela François Roux, Duch diizinkan oleh Majelis untuk menanggapi Pernyataan Pembukaan Co-Jaksa. Tanggapan Duch’s diawali dengan ungkapan penyesalan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh CPK dari tahun 1975 sampai dengan 1979, dan permohonan agar semua pihak yang terkena dampak untuk “membuka jendela untuk pemberian maaf.” Seiring dengan ungkapan rasa malunya terhadap tindakan-tindakannya di masa lalu, Duch mengakui ia memiliki pertanggungjawaban hukum atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan di S-21. Ia dengan jelas menyatakan “Saya bertanggungjawab atas kejahatan yang terjadi S-21... terutama penyiksaan dan eksekusi terhadap orang-orang di sana.”

Duch menyatakan bahwa ia “sangat menyesal dan malu” akan kejahatan yang ia lakukan atas nama Angkor, namun pada saat itu ia tidak berani untuk bahkan berpikir untuk menentang perintah para atasannya. Ia menegaskan bahwa ia telah memutuskan untuk bekerjasama dengan Pengadilan ini, karena hanya itulah yang dapat ia lakukan untuk “melegakan duka yang dirasakan rakyat Kamboja”. Ia juga membuat suatu gambar untuk para Hakim, yang kemudian ditunjukkan kepada seluruh pihak dan para hadirin dengan proyektor. Gambar ini menunjukkan Ta Mok, Pol Pot and Nuon Chea duduk di depan suatu tiga tumpukan yang nampaknya adalah tulang belulang manusia. Di belakang mereka terdapat gambar tiga celurit, dan terdapat tulisan-tulisan pemikiran di atas tiap kepala dari tiga orang tersebut. Duch menyatakan bahwa gambar ini merujuk kepada “Partai CPK” dan “rezim otoriter, tanpa kelas”. Gambar ini kemudian dimasukkan ke dalam BAP-Surat Dakwaan (case file).

¹ JCE adalah bentuk atau moda pertanggungjawaban individu dimana beberapa orang dengan *tujuan yang sama (common purpose)* melakukan tindak pidana yang kemudian diterapan apakah bersama-sama atau oleh beberapa anggota dari beberapa individu tersebut. Ada 3 kategori JCE: 1. “dasar”, dimana semua co pelaku, bersama-sama bertindak sesuai dengan tujuan yang sama, memiliki niat yang sama (lihat, misalnya Penuntut Umum v Tadic, Putusan, No. Kasus IT-94-I-A, Majelis Banding, 15 Juli 1999, paragraf 188-192, 226). 2. “sistematis” serupa dengan kategori pertama, dengan ciri-ciri umum a) adanya sistem perlakuan yang buruk yang tersistematisir b) kesadaran terdakwa tentang sifat dari sistem tersebut dan c) partisipasi aktifnya dalam penegakan sistem tersebut (lihat misalnya Penuntut Umum v Elizaphan Ntakurutimana dan Gerard Ntakurutimana, Putusan, No. Kasus ICTR-96-10 A dan ICTR-96-17.A, Majelis Banding, 13 Desember 2004 paragraf 464). 3. “perpanjangan” atau *extended*, dimana terdapat suatu tujuan bersama untuk melakukan tindakan pidana, dimana salah satu pelaku melakukan suatu tindakan yang walaupun di luar dari tujuan bersama tersebut, tetap saja merupakan konsekuensi alamiah dan terduga dari penerapan tujuan bersama itu (Lihat, misalnya, Penuntut Umum v Vasiljevic No. Kasus IT-98-32-A, Putusan, 25 Februari 2004 paragraf 95-101)

Walaupun Duch menyatakan bahwa ia menerima bahwa ia bertanggungjawab, posisi Pembela tentang sejauh mana ia bertanggungjawab tetap tidak jelas. Ketidakjelasan ini muncul karena para Pengacara Pembela memmpersalahkan beberapa fakta dalam Surat Dakwaan berkenaan tentang tingkatan pertanggungjawaban Duch's atas kejahatan di S-21. Setelah Duch mengungkapkan tanggapannya, para Co-Pembelanya melakukan hal yang sama. Sebagian dari tanggapan Co-Pembela disampaikan oleh François Roux, yang mana dengan jelas diungkapkan bahwa sejauh mana Duch bertanggungjawab adalah suatu isu kunci, yang kemungkinan besar akan menjadi subyek pertimbangan yang cukup pelik.

François Roux memohon kepada Majelis agar tidak meminggirkan fakta bahwa Duch adalah "penerima dan penyalur" perintah dari atasannya. Walaupun ia menyatakan bahwa ia "akan kembali kepada isu mematuhi perintah", Roux menerima bahwa "Sejak Nuremberg [faktor] ini [hanyalah] merupakan situasi yang meringankan dan bukan menghapuskan pertanggungjawaban". Pada titik ini nampaknya Robert Peti dan François Roux sepakat bahwa melakukan tindakan karena takut hidupnya atau hidup keluarganya terancam, bukanlah merupakan pembelaan dalam hukum pidana internasional.

Patut dicatat bahwa François Roux memilih untuk tidak membahas isu ini dengan cara yang sangat legalistis. Ia memohon kepada Majelis untuk menimbang perjalanan Duch dalam mendapatkan kembali kemanusiaannya, yang ia rujuk sebagai suatu perjalanan yang "panjang... dan terkadang penuh kesepian". Ia juga membumbui tanggapannya terhadap Co-Jaksa dengan mengingatkan kembali tentang peranan Duch saat ini dalam mendorong rekonsiliasi nasional dan kemanusiaan pada umumnya. Ia menyimpulkan tanggapannya dengan memohon kepada Majelis untuk menimbang bagaimana caranya agar "persidangan ini dapat memungkinkan mereka yang telah keluar dari kemanusiaan untuk kembali kepada kemanusiaan."

Pengacara Pembela Kamboja Kar Savuth juga memberikan tanggapannya kepada pernyataan pembukaan Jaksa dengan menghimbau kepada Majelis untuk tidak mengizinkan Duch untuk menjadi kambing hitam. "Semua yang paling bertanggungjawab harus dituntut secara hukum. Lebih baik tidak mengadili siapapun dibanding hanya mengadili beberapa dan membiarkan yang lainnya bebas," ungkapnya. Ia menambahkan bahwa Duch hanyalah satu dari 196 kepala penjara di Kamboja, dan cakupan serta keparahan dari tindak pidana yang telah ia lakukan di S-21 bukanlah yang paling buruk dibanding tempat penahanan lain saat itu. Secara khusus ia merujuk kepada kenyataan bahwa terdapat 150,000 korban yang dibunuh di pusat interogas di Kampong Chnang. Pada hari berikutnya Kar Savuth menjelaskan kepada Majelis bahwa tanggapannya bukanlah dimaksudkan sebagai mempertanyakan yurisdiksi tribunal ini, namun ia hanya ingin mengungkapkan hasil pengamatannya untuk ditimbang oleh Pengadilan.

Penahanan yang Berkelanjutan dari Terdakwa ditentang sebagai Melanggar UUD dan merupakan pelanggaran terhadap Hukum Internasional. Pada hari ketiga dan terakhir dari persidangan minggu ini, pengacara Pembela Internasional François Roux diizinkan oleh Majelis untuk mengangkat isu tentang penahanan kliennya yang saat ini telah berlangsung kurang lebih 10 tahun tanpa pengadilan. Roux berusaha untuk mengkarakterisasikan penahanan kliennya yang berkelanjutan ini sebagai pelanggaran hukum Kamboja dan instrument-instrumen hukum internasional.

Berkenaan tentang bagaimana penahanan ini telah melanggar hak-hak kliennya menurut hukum domestic, Roux menyatakan “Kami menghadapkan kepada anda permintaan agar anda mengakhiri penahanan Duch karena hal ini telah berlangsung dalam jangka waktu yang jauh melampaui batasan waktu yang ditetapkan oleh perundang-undangan Kamboja ...” Guna mendukung permohonannya, ia mengutip UUD Kamboja dan UU Administrasi Transisional PBB untuk Kamboja (UNTAC). Ia juga merujuk kepada UU tahun 1999 tentang Jangka Waktu Penahanan Pra Persidangan, yang melarang “penahanan bersyarat” yang berlangsung lebih lama dari tiga tahun. Roux selanjutnya meminta agar Majelis memperhatikan Pasal 9 dan 14 dari Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Ia juga menyindir bahwa jangka waktu penahanan kliennya tanpa diadili sama sekali bahkan melanggar makna dari istilah “tahanan bersyarat” itu sendiri. Ia kemudian memohon agar Majelis menghentikan penahanan kliennya selama persidangan, dan menyatakan bahwa kliennya bersedia untuk menerima persyaratan apapun yang Majelis inginkan selama ia bebas dari tahanan. Selanjutnya Roux nampaknya ingin agar Majelis menyatakan bahwa waktu yang telah dihabiskan Duch dalam tahanan sejak Mei 1999 akan dihitung dan dikurangi dari hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya bila memang nantinya ia diputus bersalah, dan pengurangan hukuman tambahan juga akan diberikan kepadanya sebagai kompensasi atas pelanggaran hak-haknya.

Sebagai usahanya lebih lanjut untuk memperkuat argumennya, Roux mengandalkan jurisprudensi kasus *Jean-Bosco Barayagwiza v The Prosecutor*, suatu putusan Majelis Banding Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda dan Pengadilan Pidana Internasional Yugoslavia pada tanggal 3 November 1999.^{vii} Ia menghimbau kepada Majelis untuk mengingat kembali kata-kata Hakim Agung Amerika Serikat Brandeis, yang dikutip dalam putusan kasus *Barayagwiza*, ketika ia menyatakan peringatan tentang kemungkinan terjadinya “dampak boomerang” bila “negara melakukan pelanggaran demi mendapatkan putusan bersalah” dengan impunitas terhadap seseorang. Kembali dalam usahanya untuk memperkuat pendiriannya, Roux juga merujuk kepada pendapat yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja PBB tentang Penahanan Bersyarat pada tanggal 30 November 2007 dan juga jurisprudensi Pengadilan HAM Eropa. Keputusan bulan November 2007 khususnya penting karena berkaitan dengan penahanan 8 tersangka di Lebanon setelah dibunuhnya Rafik Hariri. Keputusan yang dikeluarkan melihat penahanan para tersangka tersebut sebagai “sewenang-wenang” dan akhirnya empat dari delapan tersangka akhirnya dibebaskan. Pengadilan Khusus untuk Lebanon, suatu pengadilan hibrida

yang didirikan khusus untuk mengadili kasus ini dan mulai bersidang secara resmi satu bulan yang lalu, akan diminta untuk mengeluarkan putusan tentang nasib keempat tersangka yang tersisa. Jadi putusan Majelis di TKM mungkin akan berdampak kepada putusan Pengadilan Khusus untuk Lebanon.

Roux menyatakan kesadarannya bahwa permintaannya ini membutuhkan Majelis membuat “keputusan yang sulit”. Namun ia menekankan bahwa persidangan ECCC memiliki tujuan yang lebih luas, yakni memberikan contoh kepada system peradilan lokal dan nasional. Ia menekankan peranan pengadilan ini sebagai wali hak asasi manusia, dan menggarisbawahi kenyataan bahwa integritas pengadilan ini sedang dipertaruhkan, dan kemudian ia menghimbau kepada Majelis untuk bertindak sesuai maksim, “*Dura lex sed lex.*” [Hukum memang sulit namun ia tetaplah hukum].

Tanggapan Co-Jaksa. Dalam tanggapannya, Co-Jaksa Chea Leang menegaskan bahwa Duch harus tetap ditahan. Ia kembali mengulang argumen yang telah diberikan oleh Co-Jaksa selama tahap pra-persidangan, yakni bahwa TKM adalah pengadilan yang terpisah dari dan mandiri terhadap Pengadilan Militer Kamboja dan bahwa dengan demikian Majelis tidak bertanggungjawab atas waktu yang dijalani Duch didalam tahanan pengadilan tersebut. Ia juga mengutarakan bahwa jalur yang seharusnya ditempuh berkenaan tentang isu ini adalah melalui pengadilan domestic/nasional. Kemudian ia juga memaparkan kebutuhan untuk memastikan keamanan dan keselamatan Duch, sesuai dengan Peraturan 63(3)(b)(iv) dari Peraturan Internal Pengadilan. “Masyarakat dengan jelas mengetahui siapa Duch- terdapat resiko bahwa kelompok keluarga korban akan mencoba membalas dendam”, ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa Duch sendiri menyatakan ia menerima tanggungjawab terhadap kejahatan yang didakwakan kepadanya, yang mana bagian pertama dari test ganda dalam Peraturan 63(3)² telah dipenuhi. Chea Leang kemudian melanjutkan dengan menyinggung Pasal 35(d) dari UU Pendirian ECCC, yang menyatakan bahwa terdakwa memiliki hak untuk hadir pada saat ia diadili. Co-Jaksa Nasional memutar balik hak terhadap pengadilan yang adil dengan menyatakan bahwa adalah penting untuk memastikan Duch tetap dalam tahanan agar menghindari persidangan *in absentia*.

3. Partisipasi Korban dan Perlindungan serta Dukungan terhadap Saksi dan Korban

Kehadiran Pihak Sipil: Pada dua hari pertama persidangan Duch, mayoritas pihak sipil hadir: dari 93 korban yang berpartisipasi dalam kasus Duch, 63 hadir apakah itu di dalam ruang pengadilan itu sendiri ataupun di galeri publik. Namun pada hari ke 3 jumlah pihak sipil berkurang menjadi hanya 10 yang duduk di ruang

² Peraturan 63 (3) : Co Hakim Penyidik dapat memerintahkan Penahanan Bersyarat (Sementara) dari Terdakwa hanya bila prasyarat-prasyarat ini dipenuhi: a) terdapat alasan yang memiliki dasar yang kuat untuk mempercayai bahwa orang tersebut mungkin telah melakukan tindak atau tindak-tindak pidana yang dirincikan dalam Permohonan Awal atau Permohonan Tambahan b) Co-Hakim Penyidik menimbang bahwa Penahanan Bersyarat (Sementara) adalah tindakan yang diperlukan untuk i) mencegah Terdakwa dari menekan salah satu atau lebih saksi maupun korban atau untuk mencegah kolusi antara Terdakwa dan kaki tangan tindak pidana yang berada di bawah yurisdiksi ECCC ii) menjaga barang bukti atau mencegah penghancuran barang bukti iii) memastikan kehadiran Terdakwa di persidangan iv) melindungi keamanan Terdakwa atau v) menjaga ketertiban umum

pengadilan. Ini kemungkinan besar terjadi karena Unit Korban hanya mengorganisir transport dan akomodasi untuk dua hari pertama persidangan

Hak Representasi : mayoritas pengacara pihak sipil hadir pada minggu pertama persidangan walaupun 5 dari 9 pengacara internasional dari kelompok-kelompok tersebut tidak hadir^{viii} Kecuali persidangan pada hari Rabu pagi^{ix} tiap-tiap dari 4 kelompok pihak sipil diwakili oleh satu pengacara nasional dan satu pengacara internasional, yakni Ty Srinna dan Alain Werner (Swiss) untuk Pihak Sipil (PS)1;^x Kong Pisey atau Yung Panith (bergantian) dan Silke Studzinsky (Jerman) untuk PS2; PS3 diwakili oleh Moch Sovannary atau Kim Mengkhy (bergantian) dan Martine Jacquin (Prancis); sementara PS4 diwakili oleh Hong Kimson (yang juga mewakili PS2) dan Pierre Olivier Sur.

Hak untuk mengungkapkan pendapat tentang isu-isu penahanan bersyarat: setelah Pembela dan Penuntut Umum memaparkan argumentasi mereka berkenaan tentang penahanan bersyarat (sementara) dari Terdakwa pada hari Rabu, para pengacara pihak sipil mengajukan permohonan akan hak untuk memberikan masukan. Walaupun pada awalnya Majelis langsung menolak permohonan yang diajukan oleh Alain Werner, Majelis kemudian setuju untuk mendengarkan argumen tentang mengapa hak untuk mengajukan pendapat tentang isu ini adalah penting bagi Pihak Sipil setelah pengacara Silke Studzinski menekankan betapa hal ini sangat mendesak untuk didiskusikan.

Para pengacara pihak sipil mengajukan beberapa argumen untuk mendukung posisi mereka. Setelah mengulas tentang fakta bahwa kepentingan pihak sipil adalah sesuatu yang secara mendasar dan secara langsung terkait dengan pembebasan Terdakwa, Studzinski mengangkat isu kekonsistenan dengan preseden di TKM. Ia secara khusus merujuk pada yurisprudensi terdahulu dari Majelis Pra-Persidangan yang memberikan hak partisipasi yang luas kepada para pihak sipil selama tahap pra-persidangan, termasuk hak untuk mengungkapkan pendapat mereka tentang surat perintah penahanan ketika kepentingan mereka terkait didalamnya.^{xi} Pengacara Sur lebih jauh lagi merujuk kepada Peraturan 82 dari Peraturan Internal Pengadilan yang harusnya diinterpretasikan dengan menimbang peraturan 63. Walaupun Sur tidak menyatakan hal ini, sebenarnya penerjemahan Peraturan 63 (4) dengan menimbang Peraturan 23 ketika menetapkan hak-hak pihak sipil untuk berpartisipasi dalam tahap banding penahanan pra-persidangan telah dilakukan oleh Majelis Pra Persidangan, yang menghasilkan keputusan bahwa pihak sipil berhak untuk berpartisipasi.^{xii}

Pengacara Pembela Francois Roux kemudian melakukan sanggahan terhadap argument-argumen di atas dengan mengangkat dua isu. Pertama, ia berargumentasi bahwa isu tentang penahanan bersyarat (sementara) harus dilihat sebagai berkaitan dengan penjatuhan hukuman bila Terdakwa diputus bersalah, dan jelas Pihak Sipil tidak memiliki peranan dalam penetapan hukuman seorang Terdakwa karena tentunya mereka memiliki bias sendiri. Kedua, ia merujuk kepada Peraturan

82(2)³ yang didalamnya tidak menyebutkan partisipasi pihak Sipil sama sekali dan kemudian ia menyatakan bahwa tidak disebutkannya partisipasi pihak Sipil merupakan suatu kesengajaan untuk tidak mengikutsertakan mereka dalam pembahasan tentang isu ini; dan bahwa bila Majelis Hakim ingin merubah peraturan ini maka hal tersebut harus dilakukan oleh Musyawarah Hakim ECCC sebagai amandemen resmi dan bukanlah sebagai penafsiran terhadap pasal tersebut.

Roux juga mengomentari pernyataan Martine Jacquin yang agak emosional yakni ketika ia mempertanyakan bagaimana mungkin pernyataan penyesalan Duch sebelumnya dapat dianggap sungguh-sungguh bila hari berikutnya ia meminta untuk dibebaskan. Roux dalam tanggapannya menghimbau kepada para Pihak Sipil untuk “tetap melaksanakan bagian mereka selama persidangan” dan tidak membahas wilayah yang bukan pada tempatnya untuk mereka campuri.

Hak untuk Berpartisipasi Secara Umum: Selama persidangan para pengacara pihak Sipil beberapa kali berusaha untuk mengajukan argumen untuk memperluas hak-hak partisipasi mereka dari yang ditetapkan oleh UU Pendirian Majelis Luar Biasa dan Peraturan Internal Pengadilan. Selain permohonan untuk dilibatkan dalam pembahasan tentang perintah penahanan, mereka juga mengajukan untuk memiliki hak untuk memaparkan Pernyataan Pembukaan.^{xiii} Permintaan ini kemudian dimodifikasi menjadi hak untuk menanggapi pernyataan Terdakwa. Untuk kedua isu ini, Sur merujuk tentang kebutuhan untuk memastikan keseimbangan kekuatan (equality of arms) antar pihak di persidangan, yang seharusnya mencakup pemastian posisi Pihak Sipil sebagai pihak yang setara dalam persidangan. Sebagai tambahan terhadap argumentasi di atas, Studzinsky menegaskan beberapa kali bahwa semangat dan gagasan keberadaan pihak sipil tidak dapat dipahami hanya sebagai hak untuk menghadiri persidangan secara fisik, tapi juga mencakup hak Pihak Sipil untuk didengarkan dan memastikan pandangan dan keprihatinan mereka juga dipertimbangkan.

Isu lainnya yang diangkat oleh Pengacara Martine Jacquin adalah pentingnya agar kesepakatan tentang fakta yang tidak diperdebatkan untuk dibacakan di muka persidangan. Jacquin merasa bahwa adalah sangat penting untuk menginformasikan kepada publik dan korban dan juga agar kesepakatan ini dimasukkan ke dalam catatan persidangan secara resmi. Ia menyatakan bahwa hal ini khususnya penting bagi Pihak Sipil yang tidak memiliki akses langsung ke BAP-Surat Dakwaan. Namun patut dicatat bahwa pada hari ketika fakta-fakta ini dibacakan, hanya terdapat 10 orang Pihak Sipil di dalam ruang pengadilan, dan tidak ada yang hadir di galeri public.

Perlindungan Saksi: Tidak ada saksi yang dipanggil ke muka pengadilan minggu ini. Namun ketika pada hari Rabu sore Co Jaksa Robert Petit membacakan bagian-

³ Peraturan 82(2) : Majelis dapat, pada saat kapanpun selama persidangan, memerintahkan pembebasan seorang Terdakwa, atau bila perlu pembebasan dengan jaminan, atau penahanan seorang Terdakwa sesuai dengan peraturan-peraturan internal ini. Majelis akan memutuskan tentang hal-hal tersebut di atas setelah mendengarkan pernyataan dari Co-Jaksa, Terdakwa, dan Pengacara Pembelanya.

bagian BAP-Surat Dakwaan yang tidak diperdebatkan oleh Penuntut Umum dan Pembela, ia membacakannya dari versi dokumen dimana nama para saksi belum disamarkan. Setelah beberapa menit Hakim Cartwright menginterupsinya, meminta ia untuk menggunakan nama samaran untuk nama-nama saksi. Namun tetap saja dalam beberapa titik Robert Petit secara tidak sengaja membacakan nama-nama yang dalam versi publik BAP-Surat Dakwaan telah disamarkan.

4. Manajemen Pengadilan

Manajemen Judisial. Pada umumnya para hakim nampaknya sangat berhati-hati dalam memastikan persidangan berlangsung secepat mungkin, yang nampak ketika Ketua Majelis Nil Nonn beberapa kali mengintervensi untuk mencegah para pengacara mengangkat argument yang tidak relevan ataupun mengulang-ulang. Namun pada hari Senin persidangan ditutup lebih awal dari jadwal (karena Co-Jaksa meminta agar mereka dapat memaparkan Pernyataan Pembukaan tanpa terpotong, dan untuk itu mereka membutuhkan dua jam, sementara saat itu waktu tersisa dalam jadwal hanyalah 1 jam) dan pada hari Rabu istirahat makan siang diperpanjang. Hal ini bila terjadi terus menerus dapat menjadi sumber permasalahan, yakni ini bisa menjadi pertanda awal bahwa Pengadilan nantinya akan terjerumus pada kebiasaan-kebiasaan manajemen persidangan yang buruk yang seringkali didapati di tribunal-tribunal internasional pada umumnya.^{xiv} Namun minggu pertama persidangan memang merupakan titik yang terlalu awal untuk melakukan penilaian apapun tentang hal ini.

Masalah Penerjemahan Selama tiga hari persidangan Pengadilan mengalami interupsi penerjemahan dalam berbagai titik. Lebih dari sekali Ketua Majelis harus menghentikan persidangan sejenak karena permasalahan teknis. Lebih jauh lagi, ketidakkonsistenan dan ketidaklengkapan penerjemahan seringkali terjadi. Nampaknya penerjemah terkadang tidak dapat mengikuti para pihak yang berbicara terlalu cepat dan mereka tidak memiliki mekanisme apapun untuk memperingatkan orang yang sedang berbicara secara cepat dan tidak terbuka. Hal ini penting untuk diselesaikan oleh Pengadilan. Bila permasalahan ini berlanjut, ini dapat memberikan dampak kepada kemampuan para pihak untuk berinteraksi secara lincer dan efisien.

Masalah Teknis Terjadi beberapa masalah teknis berkenaan dengan mikrofon dan pemastian bahwa penerjemahan diperdengarkan di ruang persidangan maupun galeri, dan juga sedikit gangguan berkenaan tentang tayangan visual selama Pernyataan Pembukaan Co-Jaksa. Namun masalah-masalah ini dengan cepat dan efisien diselesaikan.

Lampiran A dari laporan ini mencakup beberapa table berkenaan dengan manajemen persidangan dan beberapa informasi lebih lanjut.

ⁱ Co-Jaksa Internasional Robert Petit, mengutip sejarawan Yosef Hayim Yerulshami, dalam pernyataan pembukaannya di persidangan, 31 Maret 2009.

ⁱⁱWalalupun Peraturan 82*bis* dari Peraturan Internal Pengadilan tidak mengatur bahwa pihak sipil dapat melakukan representasi berkenaan dengan isu ini, para pengacara pihak sipil berargumentasi bahwa sangatlah penting mereka diperbolehkan untuk melakukannya

ⁱⁱⁱSemua referensi dalam laporan pengamat yang merujuk kepada Peraturan Internal menggunakan versi Peraturan yang paling terakhir, yang dapat diakses di situs Pengadilan: lihat www.eccc.gov.kh.

^{iv}Patut dicatat bahwa jumlah waktu yang digunakan untuk membahas isu ini hampir melampaui jumlah waktu yang dihabiskan untuk membacakan paragraf-paragraf tersebut.

^vPada satu titik dalam Pernyataan Pembukaan Co-Jaksa, Pengacara Pembela Internasional Francois Roux mengajukan keberatan tentang penggunaan potongan film tentang S-21 karena dimasukkannya potongan film tersebut kedalam BAP masih dibahas oleh Majelis Persidangan. Co-Jaksa Robert Petit menanggapi dengan mengatakan bahwa potongan yang akan ditayangkan tidak sama dengan yang sedang dibahas oleh Majelis, dan bahwa film ini sudah menjadi bagian dari BAP selama satu tahun lebih. Majelis Hakim menolaj keberatan Pembela.

^{vi}Menurut Co-Jaksa, 37% tahanan S21 dari militer, 41% dari pemerintah, 3% orang Vientnam, 15% adalah “orang baru” dan kategori lainnya, sementara 4% adalah para isteri dari mereka yang ditahan.

^{vii}Khususnya Roux mengutip Paragraf 106 dan 111. Lihat *Penuntut Umum v Jean-Bosco Barayagwisa* “Keputusan”, (Majelis BANDING), 3 November 1999. Dapat dilihat di situs www.ictr.org.

^{viii} Yakni Karim A. A. Kahn (Inggris) dan Brianne McGonigle (AS) dari PS1, juga Annie Delahaie, Elizabeth Rabesandratana dan Philippe Canonne dari PS3 (semua berasal dari Prancis).

^{ix}Hong Kimson tidak hadir pada hari Rabu pagi.

^xIstilah ‘PS’ merujuk pada Kelompok Pihak Sipil dan akan digunakan sebagai ringkasan dalam laporan pengamatan ini.

^{xi}Lihat *Penuntut Umum vs. Nuon Chea*, ‘Putusan tentang Partisipasi Pihak Sipil Berkenaan tentang Penahanan Bersyarat (Sementara) (002/19-09-2007-ECCC/OCIJ (PTC01)), 20 Maret 2008, terutama paragraph 35 – 49. Dapat diakses di situs pengadilan para alamat: www.eccc.gov.kh/english/court_doc.list.aspx.

^{xii}*ibid.*, pada par.41.

^{xiii}Isu ini diangkat oleh Pierre Olivier Sur, yang menyatakan pentesalannya bahwa pihak sipil tidak diberikan hak untuk berbicara selama dua hari pertama. Majelis Hakim telah menolak permohonan tertulis yang diajukan sebelum persidangan substantive dimulai berkenaan dengan pemberian izin pihak sipil untuk melakukan pernyataan pembukaan.

^{xiv}Lihat Tabel 1, Lampiran A. Persidangan hari Senin diakhiri satu jam lebih awal karena Co-Jaksa meminta agar pernyataan pembukaan mereka dapat dilakukan tanpa dipotong (yang berarti bila dilakukan pada hari itu, persidangan akan berakhir satu jam melampaui jadwal, yakni pukul 17.15 dan bukan pukul 16.15). Dengan mengakhiri persidangan pada saat itu, berarti hari pertama persidangan hanya berlangsung selama 3 jam. Untuk diskusi tentang tribunal-tribunal lainnya, lihat antara lain War Crimes Studies Center “Special Court for Sierra Leone: Report on the RUF Trial Proceedings (17 January 2008)” (War Crimes Studies Center, Berkeley, 2008).

LAMPIRAN A – LAPORAN NO.2 (MARET 30 – APRIL 1, 2009)

TABEL 1: JUMLAH JAM DALAM PERSIDANGAN

Tabel berikut ini menetapkan jumlah jam yang dihabiskan oleh Majelis dalam persidangan selama minggu pertama.

HARI/ TANGGAL :	MULAI:	REHAT SIANG:	MAKAN SIANG	REHAT SORE	REHAT SORE	JUMLAH JAM PERSIDANGAN
MON. 30/03/09	10.10AM	-	12 – 1.30 siang/sore	14.30 – 3 siang/sore	3.10 siang/sore	3 jam
TUE. 31/03/09	9.00 pagi	10:35 – 11:04 pagi	12:10 – 13:40 siang/sore	14:30 – 15:05 siang/sore	16:20 siang/sore	4 jam 46 menit
WED 01/04/09	9.10 pagi	9:59 – 10:40 pagi	12:10 – 13:55 siang/sore	15:15 – 15:40 siang/sore	16:15 siang/sore	4 jam 14 menit
Rata-rata jam persidangan:						4 jam
Jumlah jam minggu :						12 jam
Jumah jam, hari dan minggu persidangan:						12 jam dalam 3 hari dalam 1 minggu

TABEL 2: SAKSI YANG AKAN DIPANGGIL

Tabel berikut ini menyatakan nama samaran saksi-saksi yang disebutkan dalam Pernyataan Pembukaan Co-Jaksa selama persidangan untuk membuktikan analisa factual dalam BAP-Surat Dakwaan. Tidak ada saksi A de Charge yang dimasukkan ke dalam table ini.

NAMA SAMARAN:	KESAKSIAN BERKENAAN TENTANG:	INFORMASI TAMBAHAN:
KW01	Saksi ditahan dan dipindahkan ke S21 setelah berulang-ulang disiksa di pusat keamanan di tingkat lebih rendah, saksi akan berbicara tentang struktur pusat keamanan	-
KW04	Duch menyiksa saksi ini di S21 menggunakan setruman listrik dan kantong plastik	Saksi juga adalah pihak sipil

KW07	Saksi bekerja di S-21 dan akan memberikan kesaksian tentang alokasi tahanan	Saksi bertugas untuk mengarsipkan biografi (riwayat hidup) pendek para tahanan; ia juga akan memberikan kesaksian tentang bagaimana foto-foto dilampirkan ke tiap biografi
KW08	Duch sebagai pembuat keputusan dan pemberi perintah di S-21	
KW09	Kader ditahan, elemen meluas dari Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, asupan gizi para tahanan	Menjaga dan memindahkan tahanan ke S-21
KW10	Usaha dan metode bunuh diri, praktek pengurusan darah, Duch berbicara tentang metode penyiksaan	Mantan sipir/interogator di S-21
KW11	-	Mantan sipir di S-21
KW15-21	Tahanan tidak diperbolehkan untuk bunuh diri Detainees were not allowed to commit suicide	
KW15	-	
KW16	Korban akan mengkonfirmasi bahwa foto memang dilampirkan ke biografi para tahanan	Fotografer di S-21
KW19	Perawatan kesehatan hanya untuk membuat seseorang bertahan hidup untuk interogasi selanjutnya	
KW20	Pelayanan kesehatan untuk para tahanan	Mantan petugas kesehatan anak
KW21	Tahanan harus menanggalkan pakaiannya, laki-laki dan perempuan dipisahkan	Mantan Sipir di S-21

TABEL 3: PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ACARA TKM DAN SISTEM NASIONAL KAMBOJA

ACARA/ISU:	UU/ PERATURAN INTERNAL ECCC:	ACARA DI TKM:	KETENTUAN KAMBOJA:	ACARA DI PENGADILAN KAMBOJA:
Pembacaan BAP-Surat Dakwaan (termasuk analisa fakta)	peraturan 82	Semua analisa fakta dibacakan (termasuk karakter Terdakwa, Latar Belakang dan pernyataan-pernyataan pra-persidangan yang "meringankan"		Tidak ada ketentuan tertulis yang jelas tentang pembacaan oleh panitera ataupun pernyataan pembukaan ringkas tentang dakwaan oleh Jaksa, setidaknya pada pengadilan tingkat pertama; Pada pengadilan yang lebih tinggi (termasuk pengadilan banding dan Mahkamah Agung) pembacaan laporan oleh hakim pelapor dibutuhkan sebelum Ketua Majelis menginterogasi Terdakwa.
Pernyataan Pembukaan oleh Jaksa	Peraturan 82	Jaksa diberikan waktu 2 jam untuk membacakan pernyataan pembuka		Jaksa membacakan dakwaan terhadap Terdakwa, pada umumnya secara ringkas.
Prasyarat Penahanan Pra-Persidangan	Peraturans 63 – 65; Peraturan 82	Harus memiliki alasan dengan dasar yang kuat bahwa kejahatan yang ditentukan memang telah dilakukan dan penahanan merupakan langkah yang diperlukan dengan salah satu atau lebih alasan dibawah ini: i) mencegah Terdakwa dari menekan salah satu atau lebih saksi maupun korban atau untuk mencegah kolusi antara Terdakwa dan kaki tangan tindak pidana yang berada di bawah yurisdiksi ECCC ii) menjaga barang bukti atau mencegah penghancuran barang bukti iii) memastikan kehadiran Terdakwa di persidangan iv) melindungi keamanan Terdakwa atau v) menjaga ketertiban umum	KUHAP Kamboja Pasal 205	KUHAP Kamboja menentukan bahwa hakim penyidik dapat menahan berdasarkan lima alasan yang sama sebagaimana yang ditetapkan di ECCC dengan satu alasan tambahan, yakni untuk mencegah pelanggaran.

Jangka Waktu Penahanan Pra-Persidangan	Peraturans 63 – 65;	Keputusan Pengadilan selama masa persidangan substantive, dengan norma bahwa orang tersebut ‘bebas’ kecuali penahanan bersyarat (sementara) diperintahkan atau dilanjutkan dari tahap proses sebelumnya (tidak ada jangka waktu yang ditentukan)	KUHAP Kamboja Pasal208, 209	<p>Dibawah UU Kamboja, jangka waktu untuk penahanan pra-persidangan tergantung dari sifat pelanggaran dan kedewasaan terdakwa.</p> <p>Terdakwa Dewasa: jangka waktu terbatas ditetapkan untuk penahanan pra-persidangan, yang baru-baru ini dimodifikasi oleh KUHAP Kamboja (CPC). UU UNTAC menyatakan bahwa periode penahanan selama maksimum 6 bulan untuk pelanggaran berat (pertama-tama 4 bulan, namun dapat diperpanjang oleh Hakim Penyidik selama 2 bulan)^{xiv}. Peraturan baru tentang penahanan pra-persidangan untuk orang dewasa mengizinkan penahanan pra-persidangan selama 6 bulan untuk kasus-kasus kekerasan, namun seorang hakim penyidik dapat mengizinkan dua kali, tiap perpanjangan selama 6 bulan. Hakim harus memberikan alasan dengan merujuk Pasal 205. Jadi batas maksimum untuk kasus pelanggaran berat adalah 18 bulan. Dalam kasus pelanggaran ringan, orang dewasa dapat ditahan selama 4 bulan yang dapat diperpanjang satu kali selama 2 bulan lebih lanjut.</p>
---	---------------------	--	-----------------------------	--

TABEL 4: JUDICIALLY AGREED OR UNDISPUTED FACTS

The following table sets out the sentences containing facts and their corresponding paragraphs in the Closing Order that have been agreed to, or are undisputed, between the Co-Prosecutors and the Defense.

Paragraph in the Closing Order (1 – 69):	Sentence(s) containing Facts Agreed or Not Contested:	Paragraph in the Closing Order (70 – 128):	Sentence(s) containing Facts Agreed or Not Contested:
10	Total	70	1, 4,5
11	2,3	71	Total
12	1,2	72	1
21	Total	73	2-4
22	1,2,4	74	1,2,4
24	1,2,4,6,7	75	Total
26	Total	76	Total
27	1,2,4,5	77	Total

28	Total	78	1,2,4
29	Total	79	Total
30	Total	80	1,5
31	1,2	81	Total
32	1-4	83	1,2
35	Total	86	Total
37	Total	88	Total
38	6	89	1-3
39	1,3	94	Total
40	2-4	102	7
41	Total	103	1,3-8
42	1	106	3,4
43	2, 5-7	107	1
44	1,5	109	1
45	2	111	1
48	Total	112	2
49	1-5	113	2
50	3-5	114	2-5
51	1-4	115	1-3
54	1	116	2,3
56	1-3, 5,6	117	Total
57	1	118	Total
59	1	119	1-3
60	1	120	Total
62	2-7	121	1,2
63	1-6	123	3
64	2,3,5,6	124	1,5
66	Total	127	2
67	1	128	Total
69	1,3,5-8		